



RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Tahun 2022 dapat tersusun dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan amanah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bertujuan sebagai bentuk penguatan SPIP dan acuan bagi kegiatan pengendalian risiko.

Penyusunan rencana tindak pengendalian mengacu kepada lima unsur pengendalian intern, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, Informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil pemetaan, penilaian, atau evaluasi atas sistem pengendalian intern yang ada.

Dengan disusunnya RTP Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022 diharapkan dapat menjadi dasar bagi kegiatan pengendalian dan penyempurnaan SPIP yang berkelanjutan. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung penyusunan dokumen RTP ini, kami mengucapkan terima kasih. Semoga dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini bermanfaat dan memiliki kontribusi konkrit bagi upaya pencapaian tujuan Bappeda kota Banda Aceh pada khususnya serta Visi dan Misi Kota Banda Aceh pada umumnya. Terima Kasih.

Banda Aceh, Januari 2022
Kepala Bappeda Kota Banda Aceh



WERI, SE, MA
Pembina Tk. I

NIP. 19640525 198903 1 026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1-1
A. Latar Belakang.....	1-1
B. Dasar Hukum.....	1-2
C. Tujuan.....	1-2
D. Manfaat.....	1-2
E. Ruang Lingkup	1-3
BAB II SEKILAS TENTANG SPIP	2-1
A. Pengertian SPIP	2-1
B. Tujuan SPIP.....	2-2
C. Unsur-unsur dalam SPIP.....	2-2
BAB III PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH	3-1
A. Identifikasi Risiko	3-4
B. Analisis Risiko	3-20
C. Informasi dan Komunikasi.....	3-28
D. Pemantauan dan Evaluasi	3-30
BAB IV PENUTUP	4-1

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Keberhasilan suatu organisasi diukur melalui kesuksesannya didalam merealisasikan seluruh target baik dari sisi kinerja maupun efektivitas pengelolaan anggaran. Bagi instansi pemerintahan, pengelolaan tersebut diatur dalam suatu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan amanah dari berbagai peraturan yaitu UU Nomor 17 tahun 2004 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Negara serta UU Nomor 28 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengendalian intern membutuhkan suatu rencana tindak yang dapat mengantisipasi segala risiko dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang menggambarkan efektivitas suatu organisasi di dalam mengendalikan berbagai risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintahan. RTP merupakan bagian dari SPIP dan bagian tak terpisahkan dari upaya pemerintah untuk mewujudkan reformasi birokrasi demi menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Oleh sebab itu setiap organisasi pemerintahan diwajibkan melakukan pengendalian intern yang didukung oleh rencana tindak di dalam mengendalikan capaian seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan.

Bappeda Kota Banda Aceh, selaku instansi penyelenggara kegiatan perencanaan pembangunan, memiliki kewajiban untuk mengontrol dan mengantisipasi seluruh ancaman risiko dalam setiap proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kota Banda Aceh. Untuk itu perlu disusun suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Banda Aceh sehingga seluruh target organisasi dapat tercapai dan pencapaian tujuan, misi dan visi Pemerintah Kota Banda Aceh juga dapat terealisasi sesuai rencana.

1.2. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;
3. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 21 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;
4. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Kota Banda Aceh; dan
5. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penilaian Resiko Pada Organisasi Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh;

1.3. TUJUAN

Penyusunan dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Bappeda Kota Banda Aceh bertujuan sebagai penguatan SPIP dan acuan bagi pimpinan dan seluruh aparatur Bappeda Kota Banda Aceh di dalam mengendalikan risiko pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan di tahun 2022.

1.4. MANFAAT

Manfaat Rencana Tindak Pengendalian (RTP) bagi Bappeda Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. Memberikan arah dalam pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan kegiatan pengendalian dan pelaksanaan tugas pokok Bappeda Kota Banda Aceh;
2. Menjadi dasar dalam membangun infrastruktur pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Menjadi bahan dokumentasi dalam penyelenggaraan SPIP dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Mengukur pencapaian Tujuan dan Sasaran Bappeda secara efisien dan efektif;
5. Menjadi bahan pengendalian sehingga pengelolaan keuangan dan aset dapat diselenggarakan secara handal; dan
6. Seluruh peraturan perundangan dapat dipatuhi.

1.5. RUANG LINGKUP

Rencana Tindak Pengendalian ini fokus kepada pengendalian pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Bappeda Kota Banda Aceh. Aktivitas pengendalian mencakup identifikasi risiko, analisis risiko, rencana tindak pengendalian, komunikasi pengendalian, serta metode pemantauan atas pengendalian. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, dan seluruh pegawai, di lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

BAB II SEKILAS TENTANG SPIP

2.1. PENGERTIAN SPIP

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam peraturan tersebut SPI sendiri didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

SPIP diawali dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, pasal 58 ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Undang-undang tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kemudian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061.05-282 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Sistem Pengendalian Intern dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus (*never ending process*) oleh pimpinan dan seluruh pegawai.

2.2. TUJUAN SPIP

PP Nomor 60 Tahun 2008 mengamanatkan bahwa Pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dilaksanakan dengan berpedoman pada SPIP. Untuk itu demi mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan Walikota/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

2.3. UNSUR-UNSUR DALAM SPIP

Dalam pelaksanaannya, pengendalian intern dipengaruhi oleh berbagai faktor yang kemudian diakomodir sehingga menjadi bagian atau unsur yang membentuk SPIP. Berikut adalah unsur-unsur dalam SPIP seperti yang dijabarkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008.

1. Lingkungan Pengendalian

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui:

- penegakan integritas dan nilai etika;
- komitmen terhadap kompetensi;
- kepemimpinan yang kondusif;
- pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

2. Penilaian Risiko

Pimpinan instansi wajib melakukan penilaian risiko yang mencakup identifikasi risiko dan analisis risiko, baik risiko yang menghambat pencapaian tujuan instansi maupun risiko yang menghambat pelaksanaan kegiatan.

3. *Kegiatan Pengendalian*

Pimpinan instansi wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian atau pengendalian intern sekurang-kurangnya terhadap kegiatan pokok/tupoksi dan kewenangan instansi. Pengendalian intern harus terkait dengan proses penilaian risiko dan dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa pengendalian intern tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4. *Informasi dan Komunikasi*

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Informasi dan komunikasi bukan hanya dalam lingkup internal, namun juga dengan para stakeholders.

5. *Pemantauan*

Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan berupa tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya oleh pihak eksternal.

BAB III

PENGENDALIAN TINGKAT UNIT KERJA BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

3.1. PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN BAPPEDA TAHUN 2022

Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan lingkungan yang mendukung pelaksanaan pengendalian. Lingkungan pengendalian intern dinilai dengan menggunakan metode *Control Environment Evaluation (CEE)* yang mencakup 8 (delapan) klasifikasi penilaian, yaitu: Penegakan integritas dan nilai etika; Komitmen terhadap kompetensi; Kepemimpinan yang kondusif; Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat; Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. Kedelapan klasifikasi tersebut diurai kedalam beberapa pertanyaan/kuisisioner dan dinilai oleh 6 (enam) orang responden yang diwakili oleh pejabat struktural pada lingkungan Bappeda Kota Banda Aceh.

Skala penilaian dan simpulan jawaban dalam kuisisioner penilaian lingkungan pengendalian, ditentukan sebagai berikut:

Tabel. 3.1.1. Skor dan Simpulan Jawaban Terhadap Kuisisioner Penilaian Lingkungan Pengendalian

Skor	Keterangan Jawaban	Simpulan Jawaban
1	Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun	Kurang Memadai
2	Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten	
3	Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan	Memadai
4	Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain	

Dari hasil penilaian kuisisioner, teridentifikasi 4 (empat) kelemahan/kerentanan pada Bappeda Kota Banda Aceh ditahun 2022. Kerentanan tersebut masuk dalam 3 (tiga) klasifikasi yaitu: klasifikasi komitmen terhadap kompetensi, klasifikasi

pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat, serta klasifikasi penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia. Keempat kelemahan tersebut memiliki nilai modus 2 dan masuk dalam simpulan jawaban KURANG MEMADAI. Kelemahan atau kerentanan lingkungan pengendalian pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2022 tersebut menjadi perhatian organisasi untuk dilakukan perbaikan dan tindak lanjut lainnya agar proses pengendalian intern dapat terlaksana dengan maksimal.

Sedangkan 5 (lima) klasifikasi/sub unsur lainnya yaitu klasifikasi penegakan integritas dan nilai etika, klasifikasi kepemimpinan yang kondusif, klasifikasi struktur organisasi sesuai kebutuhan, klasifikasi perwujudan peran APIP yang efektif, serta klasifikasi hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait, teridentifikasi MEMADAI. Secara detail, simpulan hasil penilaian tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.1.2. berikut ini:

Tabel.3.1.2. Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Tahun Penilaian : 2022

No	Sub unsur/Klasifikasi	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	-	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	-	-	Kurang Memadai	Masih ada pegawai yang mengisi posisi/jabatan belum sesuai dokumen Anjab ABK	Kurang Memadai	Formasi jabatan yang diisi masih ada yang belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi
				Kurang Memadai	Belum tersusunnya rencana peningkatan kompetensi pegawai	Kurang Memadai	Dibutuhkan dokumen rencana peningkatan kompetensi pegawai sesuai Anjab ABK
3	Kepemimpinan yang kondusif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
				Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Kurang Memadai	Pendistribusian tanggung jawab belum sesuai nomenklatur	Kurang Memadai	Belum dilakukan penyesuaian terhadap distribusi dan pendelegasian wewenang internal Bappeda
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	-	-	Kurang Memadai	Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembinaan SDM Bappeda
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	-

3.2. IDENTIFIKASI RISIKO

Dalam rangka melakukan proses pengendalian, dibutuhkan identifikasi atas berbagai ancaman atau risiko yang mengancam keberhasilan/kelancaran pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan termasuk diantaranya risiko yang mengancam keberhasilan pencapaian sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi. Dengan teridentifikasinya seluruh risiko, maka antisipasi pengendalian dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.

Identifikasi risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh dilakukan berjenjang mulai dari risiko strategis Bappeda yang mendukung pencapaian IKU Pemerintah Kota Banda Aceh, risiko strategis yang diturunkan dari IKU Pencapaian Tujuan dan sasaran strategis Bappeda sendiri, maupun risiko operasional pada organisasi Bappeda Kota Banda Aceh. Setiap level risiko tersebut diuraikan baik dari segi penyebab terjadinya risiko hingga dampak yang diakibatkan.

Bappeda sendiri sebagai badan yang mengkoordinir proses penyusunan dokumen perencanaan kota, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Banda Aceh periode 2017 – 2022, mendukung salah satu IKU kota, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat. Berikut adalah uraian identifikasi risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022.

Tabel. 3.2.1. Identifikasi Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Tahun Penilaian : 2022
 Periode yang dinilai : RPJMD 2017 - 2022
 Tujuan Strategis : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
5.1	Tujuan Strategis: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									
5.1.1	Sasaran Strategis: Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas perencanaan pembangunan Kota	RSP - 01	Walikota Banda Aceh	Tidak akuratnya data dan rendahnya ketersediaan anggaran belanja publik	Internal/ eksternal	C	Berkurangnya kepercayaan masyarakat/Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan menurun	Pemerintah Kota Banda Aceh

Tabel. 3.2.2. Identifikasi Risiko Strategis Bappeda Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD 2017 - 2022
Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
Sasaran strategis OPD : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis: Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif									
1.1	Sasaran Strategis: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	Kepala BAPPEDA	Kebijakan yang berubah dari Pemerintah provinsi dan pusat	Eksternal	C	Tidak tercapainya tujuan Pemerintah Kota yang telah ditetapkan dalam RPJMD	Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	Tidak selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO-2	Kepala BAPPEDA	Kebijakan lainnya dari Pemerintah provinsi dan pusat	Eksternal	C	Target pembangunan tahunan Kota tidak tercapai secara optimal	Pemerintah Kota Banda Aceh
		Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	Indikator kinerja dalam RPJMD tidak mencapai target	RSO-3	Kepala BAPPEDA	Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang diusulkan oleh OPD yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai	Internal/ Eksternal	C	Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak tercapai secara optimal	Pemerintah Kota Banda Aceh

Tabel. 3.2.3. Identifikasi Risiko Operasional Bappeda Kota Banda Aceh

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD 2017 - 2022
Tujuan Strategis : Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
Sasaran strategis OPD : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 01.01	Kepala bappeda	Dokumen Pelaksanaan terlambat disampaikan	Eksternal	C	Pertanggungjawaban anggaran terganggu	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD
			Perencanaan	Data pendukung usulan tidak lengkap	RO - 01.02		OPD belum memiliki data/dokumen pendukung usulan			Usulan ditolak/tidak dapat disampaikan	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 01.03		usulan terlambat disampaikan			Usulan ditolak/tidak dapat disampaikan	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 01.04		OPD terlambat melengkapi data pelaksanaan kegiatan			Pelaksanaan kegiatan terhambat/ penalty	
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 02.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal/ Eksternal	C	Aspirasi yang dikumpulkan tidak mewakili seluruh komponen gampong	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda / Masyarakat
			Perencanaan	Kurangnya data dukung usulan	RO - 02.02		Kurangnya partisipasi masyarakat			Dokumen perencanaan tidak partisipatif	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 02.03		usulan terlambat disampaikan			Perencanaan tidak tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 02.04		Kurang lengkapnya data			Kualitas dokumen perencanaan rendah	
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 03.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda / Masyarakat
			Perencanaan	Data evaluasi dan rencana program terlambat disampaikan	RO - 03.02		OPD tidak tepat waktu			Penetapan RKPD tidak tepat waktu	
			Pelaporan	Dokumen RKPD terlambat ditetapkan	RO - 03.03		Data terlambat disampaikan			APBK tidak tepat waktu	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pemantauan dan Evaluasi	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 03.04		Tahapan kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal			Kualitas dokumen perencanaan rendah	
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 04.01	Kepala Bappeda/ Ka. UPTB GIS	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda
		Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 04.02	Data dari OPD kurang lengkap		Pelaksanaan kegiatan melenceng dari jadwal				
		Pelaporan	data tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 04.03	Data dari OPD kurang lengkap		Kualitas data kurang baik				
		Pemantauan dan Evaluasi	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 04.04	Rentang waktu pelaksanaan teknis kegiatan terlalu singkat		Kualitas data perencanaan tidak baik				
5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 05.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Tidak tersedianya anggaran	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD
		Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 05.02	Data tidak tersedia		Waktu pengumpulan data menjadi lebih lama				
		Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 05.03	Data tidak tersedia		Kualitas laporan tidak akurat				
		Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 05.04	Data tidak tersedia		Kualitas laporan tidak akurat				

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
6	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 06.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas		C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD
			Perencanaan	Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kota tidak sesuai jadwal	RO - 06.02		OPD terlambat menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan			Data monev pembangunan kota tidak terpenuhi	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 06.03		OPD terlambat menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan			Realisasi kegiatan tidak terukur secara akurat	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurang terpantaunya kegiatan secara optimal	RO - 06.04		Data OPD tidak lengkap			Laporan Monev tidak akurat	
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 07.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/ OPD
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 07.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan			Eksternal	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		daerah	Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 07.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi			Kualitas dokumen perencanaan OPD rendah	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 07.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
8	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 08.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP PP Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/ OPD
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 08.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan	Eksternal		Dokumen perencanaan tidak tersedia sesuai jadwal	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 08.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi			Kualitas dokumen perencanaan OPD rendah	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 08.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 09.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/ OPD

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	n yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 09.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan	Eksternal		Dokumen perencanaan tidak tersedia sesuai jadwal	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 09.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi			Kualitas dokumen perencanaan OPD rendah	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 09.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 10.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas		C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Masyarakat
			Perencanaan	Data kemiskinan tidak update	RO - 10.02		OPD tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan			Penerima bantuan kemiskinan tidak tepat sasaran	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 10.03		OPD terlambat memberikan laporan			Dokumen LP2KD tidak selesai tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 10.04		Keikutsertaan anggota tim TKPK rendah			Kualitas pelaksanaan program kemiskinan rendah	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 11.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/ OPD
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 11.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan			Eksternal	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 11.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi	Kualitas dokumen perencanaan OPD rendah			
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 11.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai	Keberhasilan kegiatan sulit diukur			
12	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 12.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/ OPD
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 12.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan			Eksternal	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 12.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi	Dokumen perencanaan tidak berkualitas			

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 12.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
13	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 13.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 13.02		jadwal dari instansi pusat tidak sesuai yang direncanakan			Program/kegiatan yang direncanakan tidak dapat terakomodir	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 13.03		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			Pelaporan tidak tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti	RO - 13.04		pagu anggaran tidak tersedia			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
14	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 14.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/ OPD
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 14.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan			Eksternal	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		daerah	Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 14.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi			Kualitas dokumen perencanaan OPD rendah	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 14.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 15.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Tidak tersedianya anggaran	Internal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
			Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 15.02		Data tidak tersedia	Eksternal		Waktu pengumpulan data menjadi lebih lama	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 15.03		Data tidak tersedia			Kualitas laporan tidak akurat	
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 15.04		Data tidak tersedia			Kualitas laporan tidak akurat	
16	Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 16.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tidak tersedianya anggaran	Internal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
			Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 16.02		Data tidak tersedia	Eksternal		Waktu pengumpulan data menjadi lebih lama	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 16.03		Data tidak tersedia			Kualitas laporan tidak akurat	
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 16.04		Data tidak tersedia			Kualitas laporan tidak akurat	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
17	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 17.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tidak tersedianya anggaran	Internal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
			Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 17.02		Data tidak tersedia	Eksternal		Waktu pengumpulan data menjadi lebih lama	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 17.03		Data tidak tersedia	Kualitas laporan tidak akurat			
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 17.04		Data tidak tersedia	Kualitas laporan tidak akurat			
18	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 18.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tidak tersedianya anggaran	Internal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
			Perencanaan	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 18.02		Tim survey terlambat memberikan jadwal	Eksternal		Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 18.03		Data tidak tersedia	Kualitas laporan tidak akurat			
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 18.04		Data tidak tersedia	Kualitas laporan tidak akurat			
19	Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 19.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan	Tidak tersedianya anggaran	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
			Perencanaan	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 19.02		Tidak sesuai Arus Kas			Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		pertanahan	Pelaporan	Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu	RO - 19.03	Evaluasi	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			Laporan tentang Pelaksanaan kegiatan penataan ruang tidak tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal	RO - 19.04		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			laporan terlambat disampaikan	
20	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawa ban tidak tepat waktu	RO - 20.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Tidak tersedianya anggaran	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
			Perencanaan	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 20.02		Tidak sesuai Arus Kas			Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	
			Pelaporan	Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu	RO - 20.03		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			Laporan tentang Pelaksanaan kegiatan penataan ruang tidak tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal	RO - 20.04		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			laporan terlambat disampaikan	
21	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawa ban tidak tepat waktu	RO - 21.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan	Tidak tersedianya laporan penelitian	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
			Perencanaan	Jadwal tertunda	RO - 21.02		Hasil penelitian terlambat disampaikan			Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
		Pengembangan	Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 21.03	Evaluasi	Hasil penelitian terlambat disampaikan			Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	Publikasi hasil diseminasi penelitian terlambat disampaikan	RO - 21.04		Pelaksanaan kegiatan diseminasi terlambat			Hasil penelitian dan pengembangan tidak dapat dimanfaatkan	

Risiko operasional Bappeda seperti yang tercantum dalam tabel 3.2.3 diatas terdiri dari 84 risiko, yang diuraikan dari 21 indikator target kinerja Bappeda pada tahun 2022 dan masing- masing diidentifikasi ke dalam 4 (empat) tahapan yaitu risiko pada tahapan pertanggungjawaban, tahapan perencanaan, pelaporan, dan tahap pemantauan dan evaluasi. Risiko operasional yang teridentifikasi tersebut bersumber baik dari internal maupun dari faktor eksternal.

3.3. ANALISIS RISIKO

Analisis risiko dinilai dari sisi kemungkinan terjadi dan dampak yang dihasilkan oleh suatu risiko. Seluruh risiko yang teridentifikasi tersebut, dilakukan analisis untuk melihat skala kemungkinan dan dampak yang dihasilkan. Penilaian skala kemungkinan diberikan dengan metode penilaian 1 sampai dengan 4. Semakin besar skala kemungkinan, maka semakin besar pula kemungkinan suatu risiko terjadi. Berikut adalah tabel penilaian skala kemungkinan menurut nilai.

Tabel 3.3.1. Skala Kemungkinan dan Level Risiko

SKALA	LEVEL RISIKO	KEMUNGKINAN
1	Sangat Jarang	1. Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan; 2. Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari nol; dan 3. Mungkin terjadi sekali dalam 25 Tahun.
2	Jarang	1. Probabilitas kurang daripada 50% tetapi masih cukup tinggi; dan 2. Mungkin terjadi dalam 10 Tahun;
3	Sering	1. Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50; dan 2. Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun;
4	Sangat Sering	1. Kemungkinan terjadi > 50%; dan 2. Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun;

Analisis dampak dilakukan untuk menilai skala dampak suatu risiko. Semakin besar nilai risiko maka semakin besar pula dampak yang dihasilkan oleh risiko tersebut. Seperti halnya skala kemungkinan, skala dampak juga diukur melalui nilai 1 hingga 4. Tabel 3.3.2 berikut menggambarkan skala dampak serta uraian dampak yang dihasilkan.

Tabel 3.3.2. Skala Dampak dan Uraian Risiko

Skala	Tingkat Dampak/ Konsekuensi Risiko	Uraian
1	Rendah sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cukup mengganggu jalannya pelayanan; 2. Meminimalkan kerusakan kecil; 3. Kerugian diatas Rp25.000.000 s.d Rp100.000.000,00; 4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp.100 juta; 5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi meskipun tidak signifikan; 6. Berdampak pada pandangan negatif terhadap institusi dalam skala lokal (telah masuk dalam pemberitaan media lokal); dan 7. Adanya kerusakan kecil terhadap lingkungan.
2	Rendah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan; 2. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan kerusakan serius; 3. Kerugian diatas Rp100.000.000 s.d Rp500.000.000,00; 4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp. 500 juta; 5. Mengganggu pencapaian tujuan organisasi secara signifikan; 6. Berdampak pada pandangan negatif thd institusi dlm skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media nasional); dan 7. Adanya kerusakan cukup besar thd lingkungan.
3	Tinggi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya pelayanan lebih dari 2 hari tetapi kurang dari 1 minggu; 2. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama; 3. Kerugian diatas Rp500.000.000 s.d Rp1.000.000.000,00 4. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 5. Sebagian tujuan organisasi gagal dilaksanakan; 6. Merusak citra institusi dlm skala nasional (telah masuk dalam pemberitaan media lokal dan nasional); dan 7. Adanya kerusakan besar thd lingkungan.
4	Tinggi Sekali	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terganggunya pelayanan lebih dari 1 minggu; 2. Adanya kekerasan,ancaman dan menimbulkan kerusakan yang serius dan membutuhkan perbaikan yang cukup lama; 3. Kerusakan fatal; 4. Kerugian yang terjadi diatas Rp. 1.000.000.000,00 5. Terjadi penambahan anggaran yang tidak diprogramkan namun tidak lebih dari Rp. 2.000.000.000,00 6. Sebagian besar tujuan organisasi gagal dilaksanakan; 7. Merusak citra institusi dlm skala nasional, penggantian pucuk pimpinan instansi secara mendadak; dan 8. Terjadinya KKN dan diproses secara hukum.

Proses penilaian dan analisis risiko yang dilakukan pada Bappeda Kota Banda Aceh dilakukan dengan melibatkan pejabat struktural sebagai responden melalui metode Focus Group Discussion (FGD). Setiap responden memberikan pendapat dan penilaian terhadap seluruh risiko yang telah diidentifikasi. Masing-masing risiko dinilai skala dampak dan kemungkinan yang telah dinilai oleh responden kemudian dirata-ratakan dan menjadi nilai skala dampak/kemungkinan suatu risiko. Nilai rata-rata penilaian skala kemungkinan dan skala dampak masing-masing risiko tersebut kemudian dikalikan menjadi nilai skala risiko. Dari hasil perkalian akan di dapat risiko dengan nilai tertinggi yang kemudian akan diangkat menjadi risiko prioritas Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2022.

Secara detail, seluruh uraian hasil analisis risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh sesuai hasil penilaian responden, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel. 3.3.3. Hasil Analisis Risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh				
1	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas perencanaan pembangunan Kota	RSP - 01	2	1	2
II	Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	3	2	6
2	Tidak selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO-2	3	1	3
3	Indikator kinerja dalam RPJMD tidak mencapai target	RSO-3	3	1	3
III	Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 01.01	3	1	3
2	Data pendukung usulan tidak lengkap	RO - 01.02	3	1	3
3	Laporan terlambat disampaikan	RO - 01.03	3	1	3
4	Data tidak lengkap	RO - 01.04	3	1	3
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 02.01	2	1	2
6	Kurangnya data dukung usulan	RO - 02.02	3	1	3
7	Laporan terlambat disampaikan	RO - 02.03	2	2	4
8	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 02.04	2	1	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
9	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 03.01	2	1	2
10	Data evaluasi dan rencana program terlambat disampaikan	RO - 03.02	3	1	3
11	Dokumen RKPD terlambat ditetapkan	RO - 03.03	2	3	6
12	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 03.04	2	1	2
13	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 04.01	3	1	3
14	Data pendukung tidak lengkap	RO - 04.02	3	1	3
15	data tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 04.03	3	1	3
16	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 04.04	2	1	2
17	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 05.01	2	1	2
18	Data pendukung tidak lengkap	RO - 05.02	2	1	2
19	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 05.03	2	1	2
20	Data tidak lengkap	RO - 05.04	2	1	2
21	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 06.01	2	2	4
22	Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kota tidak sesuai jadwal	RO - 06.02	2	2	4
23	Laporan terlambat disampaikan	RO - 06.03	2	2	4
24	Kurang terpantaunya kegiatan secara optimal	RO - 06.04	2	2	4
25	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 07.01	3	1	3
26	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 07.02	3	1	3
27	Laporan terlambat disampaikan	RO - 07.03	3	1	3
28	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 07.04	3	1	3
29	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 08.01	3	1	3
30	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 08.02	3	1	3
31	Laporan terlambat disampaikan	RO - 08.03	3	1	3
32	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 08.04	3	1	3
33	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 09.01	3	1	3
34	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 09.02	3	1	3
35	Laporan terlambat disampaikan	RO - 09.03	3	1	3
36	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 09.04	3	1	3
37	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 10.01	2	1	2
38	Data kemiskinan tidak update	RO - 10.02	3	1	3
39	Laporan terlambat disampaikan	RO - 10.03	3	1	3
40	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 10.04	3	1	3
41	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 11.01	3	1	3
42	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 11.02	3	1	3
43	Laporan terlambat disampaikan	RO - 11.03	3	1	3
44	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 11.04	3	1	3

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
45	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 12.01	3	1	3
46	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 12.02	3	1	3
47	Laporan terlambat disampaikan	RO - 12.03	3	1	3
48	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 12.04	3	1	3
49	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 13.01	2	1	2
50	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 13.02	2	1	2
51	Laporan terlambat disampaikan	RO - 13.03	2	1	2
52	hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti	RO - 13.04	2	1	2
53	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 14.01	3	1	3
54	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 14.02	3	1	3
55	Laporan terlambat disampaikan	RO - 14.03	3	1	3
56	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 14.04	3	1	3
57	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 15.01	2	1	2
58	Data pendukung tidak lengkap	RO - 15.02	2	1	2
59	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 15.03	2	1	2
60	Data tidak lengkap	RO - 15.04	2	1	2
61	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 16.01	2	1	2
62	Data pendukung tidak lengkap	RO - 16.02	2	1	2
63	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 16.03	2	1	2
64	Data tidak lengkap	RO - 16.04	2	1	2
65	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 17.01	2	1	2
66	Data pendukung tidak lengkap	RO - 17.02	2	1	2
67	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 17.03	2	1	2
68	Data tidak lengkap	RO - 17.04	2	1	2
69	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 18.01	2	1	2
70	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 18.02	2	1	2
71	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 18.03	2	1	2
72	Data tidak lengkap	RO - 18.04	2	1	2
73	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 19.01	2	1	2
74	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 19.02	2	1	2
75	Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu	RO - 19.03	2	1	2
76	pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal	RO - 19.04	2	1	2
77	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 20.01	2	1	2
78	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 20.02	2	1	2
79	Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu	RO - 20.03	2	1	2
80	pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal	RO - 20.04	2	1	2
81	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 21.01	2	1	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
82	Jadwal tertunda	RO - 21.02	2	1	2
83	Laporan terlambat disampaikan	RO - 21.03	2	1	2
84	Publikasi hasil diseminasi penelitian terlambat disampaikan	RO - 21.04	2	1	2

* diisi berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak dan kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Dari hasil analisis terlihat bahwa skor nilai skala risiko tertinggi adalah 6 (enam) dengan nilai terendah adalah 2 (dua). Risiko dengan skala tertinggi pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022 diantaranya adalah 1 (satu) risiko strategis Bappeda Kota Banda Aceh yaitu *Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD (RSO-01)* dan 1 (satu) risiko operasional Bappeda Kota Banda Aceh, yaitu *Dokumen RKPD terlambat ditetapkan (RO-03.03)*. Kedua risiko dengan nilai tertinggi dengan nilai 6 (enam) tersebut menjadi risiko prioritas Bappeda di tahun 2022.

Berikut adalah tabel risiko prioritas Bappeda tahun 2022.

Tabel. 3.3.4. Daftar Risiko Prioritas Bappeda Kota Banda Aceh Tahun 2022

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	6	Kepala BAPPEDA	Kebijakan lainnya dari Pemerintah provinsi dan pusat	Target pembangunan tahunan Kota tidak tercapai secara optimal
III Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
2	Dokumen RKPD terlambat ditetapkan	RO - 03.03	6	Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Data terlambat disampaikan	APBK tidak tepat waktu

3.4. RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Risiko prioritas yang teridentifikasi sebagai risiko dengan dampak terbesar bagi organisasi membutuhkan rencana tindak pengendalian yang terarah. Rencana tindak disusun dengan memperhatikan uraian pengendalian yang telah dilakukan sebelumnya, celah pengendalian yang ada, serta dengan mempertimbangkan seluruh sumber daya yang ada pada Bappeda Kota Banda Aceh. Selain itu perlu pula ditetapkan target waktu penyelesaian agar seluruh risiko dapat terkendali dengan baik dan tepat waktu. Berikut adalah tabel yang menggambarkan rencana tindak pengendalian atas risiko prioritas Bappeda Kota Banda Aceh pada tahun 2022.

Tabel 3.4.1. Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
II	Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	Melaksanakan asistensi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan OPD	Adanya proses penyesuaian program kegiatan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan kota	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Kepala Bappeda	Triwulan II
III	Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Dokumen RKPD terlambat ditetapkan	RO - 03.03	Menyusun kalender perencanaan penyusunan Dokumen RKPD sesuai peraturan yang berlaku	Adanya kontrol/revisi dari pemerintah Provinsi dan APIP Kota terhadap jadwal penyampaian dokumen RKPD	1. Melakukan koordinasi intensif dengan OPD penyedia data 2. Mempersiapkan surat pemberitahuan lebih awal dari jadwal yang seharusnya	Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan II

Dari 2 (dua) risiko prioritas pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2022, bentuk rencana tindak pengendalian yang masih dibutuhkan diantaranya adalah:

1. Asistensi dan koordinasi dengan OPD
2. Melakukan koordinasi intensif dengan OPD penyedia data
3. Mempersiapkan surat pemberitahuan lebih awal dari jadwal yang seharusnya

Seluruh rencana tindak tersebut direncanakan dilaksanakan mulai triwulan pertama dan triwulan kedua.

3.5. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi dalam RTP adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Agar rencana tindak yang dibangun dapat terlaksana secara optimal, dibutuhkan media dan sarana komunikasi yang tepat untuk mencapai target sasaran atau penerima informasi. Seperti halnya analisis risiko, penentuan media dan sarana komunikasi rencana tindak pengendalian disusun berdasarkan hasil FGD dengan seluruh pejabat struktural di Bappeda Kota Banda Aceh. Berikut adalah bentuk-bentuk media dan sarana pengkomunikasian atas rencana tindak pengendalian Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022:

Tabel 3.5.1. Rencana dan Realisasi Pengkomunikasian atas Kegiatan Pengendalian yang Dibangun

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Asistensi, Rapat, <i>Online meeting</i> , Surat, Surat Edaran	Bappeda	OPD	Triwulan 1 s.d 2	November 2021 - Februari 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
2	1. Melakukan koordinasi intensif dengan OPD penyedia data 2. Mempersiapkan surat pemberitahuan lebih awal dari jadwal yang seharusnya	Rapat, Surat Pemberitahuan, Surat Edaran	Bappeda dan BPKK	OPD	Triwulan 1 s.d 2	November 2021 - Juni 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

Secara umum, bentuk media dan sarana pengkomunikasian rencana tindak pengendalian pada Bappeda Kota Banda Aceh diantaranya adalah berbentuk Rapat baik rapat langsung maupun online, surat menyurat, asistensi, dan aplikasi. Sebagai instansi yang mengelola kegiatan perencanaan kota, maka target sasaran atau penerima informasi yang dilaksanakan tersebut adalah masyarakat dan OPD pada lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh.

3.6. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Langkah terakhir yang dilakukan dalam pengendalian risiko organisasi adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Adapun proses pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi beberapa jenis, yaitu:

1. Pemantauan Berkelanjutan

Adapun pemantauan yang disampaikan dalam dokumen ini adalah berupa pemantauan berkelanjutan yang secara detail berisikan metode pemantauan yang dilakukan bagi setiap rencana tindak pengendalian, penanggung jawab pemantauan, serta waktu pelaksanaannya. Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana direncanakan. Dokumentasi dan notulensi rapat, laporan progres;

2. Evaluasi Terpisah

Pemantauan lainnya adalah berupa evaluasi terpisah yang dilakukan oleh Inspektorat. Inspektorat Kota Banda Aceh melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

3. Pelaksanaan Tindak lanjut

Pelaksanaan tindak lanjut pemantauan dilakukan sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP. Bappeda Kota Banda Aceh wajib melaksanakan tindak lanjut atas hasil rekomendasi dari auditor eksternal maupun internal yang telah melakukan audit/evaluasi/reviu.

4. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim dilaporkan secara langsung kepada Walikota Banda Aceh.

Bentuk/metode pemantauan atas pengendalian intern pada Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022, beserta rencana dan waktu realisasi pelaksanaan pemantauan dapat dilihat dalam tabel 3.6.1 sebagai berikut.

Tabel 3.6.1. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Kepala Bappeda	Triwulan 1 dan 2	November 2021 - Februari 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
2	1. Melakukan koordinasi intensif dengan OPD penyedia data 2. Mempersiapkan surat pemberitahuan lebih awal dari jadwal yang seharusnya	Dokumentasi, Data Program SIPD dan Notulensi Rapat	Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan 1 dan 2	November 2021 - Juni 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

BAB IV PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Banda Aceh Tahun 2022 merupakan uraian tentang upaya Bappeda untuk mengatasi seluruh ancaman dan risiko yang mengganggu Bappeda dalam mencapai seluruh tujuan dan sasaran organisasi. Upaya tersebut dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisis seluruh risiko pelaksanaan kegiatan, menyusun rencana tindak pengendalian, identifikasi media/sarana informasi dan komunikasi, serta metode pemantauan yang diperlukan.

Dari analisis risiko pada Bappeda Kota Banda Aceh di tahun 2022, teridentifikasi 2 (dua) Risiko prioritas OPD. kedua risiko prioritas tersebut yaitu 1 (satu) risiko strategis Bappeda Kota Banda Aceh yaitu tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD dan 1 (satu) risiko operasional Bappeda Kota Banda Aceh, yaitu Dokumen RKPD terlambat ditetapkan.

Untuk mengantisipasi risiko strategis tersebut telah disusun rencana tindak pengendalian intern beserta seluruh media/sarana pengkomunikasian dan metode pemantauan yang dibutuhkan. Dengan tersusunnya dokumen RTP Bappeda Kota Banda Aceh tahun 2022 diharapkan seluruh risiko strategis khususnya yang terkait dengan perencanaan kota dapat dikendalikan dengan baik.

LAMPIRAN RTP

Form 1.a
KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA BANDA ACEH

Tahun Penilaian : 2022

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A.	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)	4	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	4	4	3	4	4	3	4	MEMADAI
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	3	2	3	3	2	2	3	MEMADAI
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	2	3	2	3	2	3	MEMADAI
B	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	2	2	2	2	2	2	KURANG MEMADAI
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	2	2	2	2	2	2	KURANG MEMADAI
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
C	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	4	4	4	4	3	2	4	MEMADAI

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	4	4	3	2	3	MEMADAI
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	4	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	4	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran OPD dan tingkat operasioanl OPD (<i>cascading</i>)	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
7	Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko	4	4	4	4	3	3	4	MEMADAI
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN							MEMADAI/ KURANG MEMADAI	
1	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	3	2	2	3	2	3	MEMADAI
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	4	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
3	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (sementara)	4	3	3	4	4	4	4	MEMADAI
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT							MEMADAI/ KURANG MEMADAI	
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
3	Kewenangan direviu secara periodik	3	2	2	2	2	2	2	KURANG MEMADAI

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	4	4	4	4	4	2	4	MEMADAI
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja	3	3	3	3	3	3	3	MEMADAI
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (Misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	4	4	4	4	4	2	4	MEMADAI
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	2	3	2	3	1	2	KURANG MEMADAI
G	PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI/ KURANG MEMADAI
1	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas efisiensi/ efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodik	3	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
2	Inspektorat Daerah melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	2	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
3	Inspektorat Daerah memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko.	2	3	3	3	3	2	3	MEMADAI
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	4	4	4	4	3	4	MEMADAI
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT								MEMADAI/ KURANG MEMADAI

NO.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun	4	4	4	4	4	4	4	MEMADAI

Banda Aceh, Januari 2022

η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 1.b
KONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
di PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Unit Kerja : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2022

No.	Sumber data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	c	d
1	Dokumen Anjab ABK	Masih ada pegawai yang mengisi posisi/jabatan belum sesuai dokumen Anjab ABK	Komitmen terhadap kompetensi
2	Dokumen Anjab ABK	Belum tersusunnya rencana peningkatan kompetensi pegawai	Komitmen terhadap kompetensi
3	SOTK Bappeda	Pendistribusian tanggung jawab belum sesuai nomenklatur	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat
4	RKA/DPA	Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan SDM	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia

Banda Aceh, Januari 2022

7 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

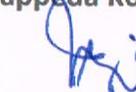
Form 1.c
SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

No.	Sub unsur/klasifikasi	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Penegakan integritas dan nilai etika	-	-	Memadai	-	Memadai	-
2	Komitmen terhadap kompetensi	-	-	Kurang Memadai	Masih ada pegawai yang mengisi posisi/jabatan belum sesuai dokumen Anjab ABK	Kurang Memadai	Formasi jabatan yang diisi masih ada yang belum sesuai dengan kebutuhan kompetensi
				Kurang Memadai	Belum tersusunnya rencana peningkatan kompetensi pegawai	Kurang Memadai	Dibutuhkan dokumen rencana peningkatan kompetensi pegawai sesuai Anjab ABK
3	Kepemimpinan yang kondusif	-	-	Memadai	-	Memadai	-
4	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-	-	Memadai	-	Memadai	-
				Memadai	-	Memadai	-
5	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-	-	Kurang Memadai	Pendistribusian tanggung jawab belum sesuai nomenklatur	Kurang Memadai	Belum dilakukan penyesuaian terhadap distribusi dan pendelegasian wewenang internal Bappeda
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	-	-	Kurang Memadai	Masih kurangnya anggaran untuk pengembangan SDM	Kurang Memadai	Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembinaan SDM Bappeda
7	Perwujudan peran APIP	-	-	Memadai	-	Memadai	-

No.	Sub unsur/klasifikasi	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
	yang efektif						
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	-	-	Memadai	-	Memadai	-

Banda Aceh, Januari 2022

7 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh 8



WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 2.a
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: 2022
Sumber Data	: RPJMD Kota Banda Aceh 2017 - 2022 dan Renstra Bappeda 2017 - 2022
Visi	: Terwujudnya Kota Banda Aceh Gemilang Dalam Bingkai Syari'ah
Misi Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan Pelaksanaan Syariat Islam dalam Bidang Penguatan Aqidah, Syariah dan Akhlak 2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga 3. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pariwisata dan Kesejahteraan Masyarakat 4. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat 5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 6. Membangun Infrastruktur Kota yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan 7. Memperkuat Upaya Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	5. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Tujuan Strategis RPJMD	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 Terwujudnya Nilai-Nilai Islami dalam seluruh aspek kehidupan warga Kota Banda Aceh 2.1 Mewujudkan Pendidikan Kota Banda Aceh yang Bermutu, Berdaya Saing, berkarakter islami dan berprestasi 3.1 Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan 4.1 Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik 6.1 Meningkatkan Kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana kota yang berwawasan lingkungan dan berkesinambungan 7.1 Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta pengendalian penduduk

Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Sasaran RPJMD	1.1.1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam penerapan syariat Islam 2.1.1 Terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada setiap jenjang pendidikan 3.1.1 Peningkatan kesejahteraan masyarakat 4.1.1 Meningkatnya Indeks Keluarga Sehat 5.1.1 Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi 5.1.2 Meningkatnya pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 6.1.1 Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian Kota Layak Huni 6.1.2 Mitigasi kebencanaan yang tangguh 6.1.3 Pemenuhan kebutuhan energi listrik dari sumber energi terbarukan 7.1.1 Pemerataan pembangunan berbasis gender dan ramah anak 7.1.2 Pengendalian pertumbuhan penduduk
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	5.1.1 Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi
IKU Sasaran RPJMD	1.1.1.1 Indeks Kota Syariah Kota Banda Aceh 2.1.1.1 Persentase Indikator SNP yang telah dipenuhi Sekolah 3.1.1.1 Angka Kemiskinan 3.1.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka 3.1.1.3 Persentase Peningkatan Nilai Investasi 4.1.1.1 Persentase Indikator Kota Sehat yang Terpenuhi 5.1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 5.1.2.1 Nilai Peningkatan Pemerintahan Berbasis Elektronik 6.1.1.1 Indeks Infrastruktur Kota Layak Huni 7.1.1.1 Indeks Pembangunan Gampong (IPG) 7.1.1.2 Persentase Indikator Kota Layak Anak yang Dipenuhi
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	5.1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Prioritas pembangunan dan program unggulan	-
Urusan Pemerintahan Daerah	1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Penelitian dan Pengembangan
Nama Dinas Terkait	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan: 5.1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</p> <p>Sasaran: 5.1.1 Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi</p> <p>IKU: 5.1.1.1 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</p> <p>PROGRAM: 1. Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Daerah</p>

Banda Aceh, Januari 2022

7 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh 8


WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 2.b
PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh												
Tahun Penilaian	: 2022												
Periode yang dinilai	: 2022												
Urusan Pemerintahan	: 1. Urusan Perencanaan 2. Urusan Penelitian dan Pengembangan												
OPD yang Dinilai	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)												
Sumber Data	: Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh 2017 - 2022												
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif												
Sasaran Strategis	: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif												
IKU Renstra OPD	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 80%;"></th> <th style="text-align: center;">IKU</th> <th style="text-align: center;">TAHUN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD</td> <td></td> <td style="text-align: center;">84%</td> </tr> <tr> <td>2. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD</td> <td></td> <td style="text-align: center;">100%</td> </tr> <tr> <td>3. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target</td> <td></td> <td style="text-align: center;">85%</td> </tr> </tbody> </table>		IKU	TAHUN	1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD		84%	2. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD		100%	3. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target		85%
	IKU	TAHUN											
1. Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD		84%											
2. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD		100%											
3. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target		85%											
Program	1. Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Daerah												

<p>Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko</p>	<p>Tujuan Strategis: Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif</p> <p>Sasaran Strategis: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif</p> <p>IKU: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase keselarasan Program RKPd terhadap RPJMD 2. Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPd 3. Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target </p> <p>PROGRAM: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan, pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah 3. Penelitian dan Pengembangan Daerah </p>
---	---

Banda Aceh, Januari 2022
 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 2.c
PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL OPD

Nama Pemda	: Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian	: 2022
Periode yang dinilai	: 2022
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Perencanaan : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Sumber Data	: Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Banda Aceh 2017 - : 2022
Tujuan Strategis	: Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Utama	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
	1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
	1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
	1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota
	1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
	1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.2.1. Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

	1.3.1. Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
	1.3.2. Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
	2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
	2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
	2.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2.1.2. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
	2.2.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2.2.2. Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
	2.2.3. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
	2.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
	2.3.1. Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

	2.3.2.	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
	2.3.3.	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	
	3.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	3.1.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	3.1.1.	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
	3.2.	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	
	3.2.1.	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	
	3.2.2.	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
	3.2.3.	Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
	3.2.4.	Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
	3.3.	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	3.3.1.	Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
	3.3.1.	Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
Keluaran/Hasil Sub Kegiatan		INDIKATOR	TARGET KINERJA
	1.1.1.	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis
	1.1.2.	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang
	1.1.3.	Jumlah dokumen RKPd yang tersusun	2 Dokumen
	1.2.1.	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis

1.3.1.	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	1 Dokumen
1.3.2.	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan
2.1.1.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen
2.1.2.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen
2.2.1.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen
2.2.2.	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan
2.2.3.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
2.3.1.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
2.3.2.	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan
2.3.3.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen	25 Dokumen

	perencanaan daerah	
	3.1.1. Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen
	3.2.1. Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	2 Laporan
	3.2.2. Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	2 Laporan
	3.2.3. Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan
	3.2.4. Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1 Laporan
	3.3.1. Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	2 Laporan
	3.3.1. Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan
Program, Kegiatan, Sub kegiatan dan Keluaran/Hasil Sub Kegiatan yang akan dilakukan penilaian risiko	1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	
	1.1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
	1.1.1. Sub kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
	1.1.2. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	
	1.1.3. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
	1.2. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1.2.1. Sub kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
	1.3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	

1.3.1.	Sub kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
1.3.2.	Sub kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
2.1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
2.1.1.	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.1.2.	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
2.2.1.	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.2.2.	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
2.2.3.	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
2.3.1.	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
2.3.2.	Sub kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur
2.3.3.	Sub kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)

	3. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	
	3.1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
	3.1.1. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	
	3.2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang ekonomi dan pembangunan	
	3.2.1. Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	
	3.2.2. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
	3.2.3. Sub kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
	3.2.4. Sub kegiatan Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
	3.3. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
	3.3.1. Sub kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
	3.3.1. Sub kegiatan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
	Indikator Sub Kegiatan	
	1.1.1. Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	2 Jenis
	1.1.2. Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	250 Orang
	1.1.3. Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	2 Dokumen
	1.2.1. Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	3 Jenis
	1.3.1. Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	1 Dokumen
	1.3.2. Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	3 Laporan

2.1.1.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen
2.1.2.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	50 Dokumen
2.2.1.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	60 Dokumen
2.2.2.	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	1 Laporan
2.2.3.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
2.3.1.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	30 Dokumen
2.3.2.	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	2 Laporan
2.3.3.	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	25 Dokumen
3.1.1.	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	1 Dokumen
3.2.1.	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	2 Laporan
3.2.2.	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	2 Laporan
3.2.3.	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	1 Laporan

3.2.4.	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	1 Laporan
3.3.1.	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	3 Laporan
3.3.1.	Jumlah laporan Informasi Hasil-hasil Penelitian dan Pengembangan	3 Laporan

Banda Aceh, Januari 2022

η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh η


WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 3.a
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD 2017 - 2022
Tujuan Strategis : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
5.1	Tujuan Strategis: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik									

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
5.1.1	Sasaran Strategis: Terwujudnya Kota Banda Aceh sebagai Kota Ramah Birokrasi	Indeks Kepuasan Masyarakat	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas perencanaan pembangunan Kota	RSP - 01	Walikota Banda Aceh	Tidak akuratnya data dan rendahnya ketersediaan anggaran belanja publik	Internal/ eksternal	C	Berkurangnya kepercayaan masyarakat/Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan akan menurun	Pemerintah Kota Banda Aceh

Banda Aceh, Januari 2022

η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 3.b
IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD 2017 - 2022
Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
Sasaran strategis OPD : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Tujuan Strategis: Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif									
1.1	Sasaran Strategis: Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif	Persentase keselarasan Program RKPD terhadap RPJMD	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	Kepala BAPPEDA	Kebijakan yang berubah dari Pemerintah provinsi dan pusat	Eksternal	C	Tidak tercapainya tujuan Pemerintah Kota yang telah ditetapkan dalam RPJMD	Pemerintah Kota Banda Aceh

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
		Persentase OPD yang Renjanya selaras dengan RKPD	Tidak selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO-2	Kepala BAPPEDA	Kebijakan lainnya dari Pemerintah provinsi dan pusat	Eksternal	C	Target pembangunan tahunan Kota tidak tercapai secara optimal	Pemerintah Kota Banda Aceh
		Persentase Indikator Kinerja dalam RPJMD yang mencapai target	Indikator kinerja dalam RPJMD tidak mencapai target	RSO-3	Kepala BAPPEDA	Masih adanya indikator kinerja dalam RPJMD yang diusulkan oleh OPD yang terlalu tinggi sehingga sulit untuk dicapai	Internal/ Eksternal	C	Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam RPJMD tidak tercapai secara optimal	Pemerintah Kota Banda Aceh

Banda Aceh, Januari 2022

η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 3.c
IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL BAPPEDA KOTA BANDA ACEH

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Nama OPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Tahun Penilaian : 2022
Periode yang dinilai : RPJMD 2017 - 2022
Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
Sasaran strategis OPD : Terwujudnya perencanaan pembangunan yang selaras dan aplikatif
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah jenis usulan program dan kegiatan daerah yang didanai oleh Sumber-sumber dana lainnya	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 01.01	Kepala bappeda	Dokumen Pelaksanaan terlambat disampaikan	Eksternal	C	Pertanggungjawaban anggaran terganggu	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD
			Perencanaan	Data pendukung usulan tidak lengkap	RO - 01.02		OPD belum memiliki data/ dokumen pendukung usulan			Usulan ditolak/tidak dapat disampaikan	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 01.03		usulan terlambat disampaikan			Usulan ditolak/tidak dapat disampaikan	
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 01.04		OPD terlambat melengkapi data pelaksanaan			Pelaksanaan kegiatan terhambat/ penalty	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
							kegiatan				
2	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	Jumlah peserta yang mengikuti Musrenbang	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 02.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal/ Eksternal	C	Aspirasi yang dikumpulkan tidak mewakili seluruh komponen gampong	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda / Masyarakat
			Perencanaan	Kurangnya data dukung usulan	RO - 02.02		Kurangnya partisipasi masyarakat			Dokumen perencanaan tidak partisipatif	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 02.03		usulan terlambat disampaikan			Perencanaan tidak tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 02.04		Kurang lengkapnya data			Kualitas dokumen perencanaan rendah	
3	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RKPD yang tersusun	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 03.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda / Masyarakat
			Perencanaan	Data evaluasi dan rencana program terlambat disampaikan	RO - 03.02		OPD tidak tepat waktu			Penetapan RKPD tidak tepat waktu	
			Pelaporan	Dokumen RKPD terlambat ditetapkan	RO - 03.03		Data terlambat disampaikan			APBK tidak tepat waktu	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pemantauan dan Evaluasi	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 03.04		Tahapan kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal			Kualitas dokumen perencanaan rendah	
4	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah jenis data perencanaan dan aplikasi yang dikelola	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 04.01	Kepala Bappeda/ Ka. UPTB GIS	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/Bappeda
		Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 04.02	Data dari OPD kurang lengkap		Pelaksanaan kegiatan melenceng dari jadwal				
		Pelaporan	data tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 04.03	Data dari OPD kurang lengkap		Kualitas data kurang baik				
		Pemantauan dan Evaluasi	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 04.04	Rentang waktu pelaksanaan teknis kegiatan terlalu singkat		Kualitas data perencanaan tidak baik				
5	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Kota Banda Aceh	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 05.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP PP Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Tidak tersedianya anggaran	Internal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD
		Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 05.02	Data tidak tersedia		Eksternal			Waktu pengumpulan data menjadi lebih lama	
		Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 05.03	Data tidak tersedia					Kualitas laporan tidak akurat	
		Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 05.04	Data tidak tersedia					Kualitas laporan tidak akurat	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
					Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
6	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 06.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas		C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD	
			Perencanaan	Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kota tidak sesuai jadwal	RO - 06.02		OPD terlambat menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan			Data monev pembangunan kota tidak terpenuhi		
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 06.03		OPD terlambat menyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan			Realisasi kegiatan tidak terukur secara akurat		
			Pemantauan dan Evaluasi	Kurang terpantaunya kegiatan secara optimal	RO - 06.04		Data OPD tidak lengkap			Laporan Monev tidak akurat		
7	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pemerintahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 07.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD	
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 07.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan			Dokumen perencanaan tidak tersedia sesuai jadwal		
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 07.03		OPD tidak menindaklanjuti			Kualitas dokumen perencanaan OPD		

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
							hasil asistensi			rendah	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 07.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
8	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang pembangunan manusia yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 08.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP PP Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 08.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan	Eksternal		Dokumen perencanaan tidak tersedia sesuai jadwal	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 08.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi			Kualitas dokumen perencanaan OPD rendah	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 08.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
9	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang perekonomian	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 09.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 09.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan	Eksternal		Dokumen perencanaan tidak tersedia sesuai jadwal	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 09.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi			Kualitas dokumen perencanaan OPD rendah	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 09.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
10	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah laporan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan daerah kota Banda Aceh	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 10.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas		C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Masyarakat
			Perencanaan	Data kemiskinan tidak update	RO - 10.02		OPD tidak menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan			Penerima bantuan kemiskinan tidak tepat sasaran	
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 10.03		OPD terlambat memberikan laporan			Dokumen LP2KD tidak selesai tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 10.04		Keikutsertaan anggota tim TKPK rendah			Kualitas pelaksanaan program kemiskinan rendah	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)		
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena	
					Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
11	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang SDA yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 11.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD	
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 11.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan			Eksternal		Dokumen perencanaan tidak tersedia sesuai jadwal
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 11.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi			Kualitas dokumen perencanaan OPD rendah		
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 11.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur		
12	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang infrastruktur yang sesuai dengan dokumen perencanaan daerah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 12.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD	
			Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 12.02		OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan			Eksternal		Dokumen perencanaan tidak tersedia sesuai jadwal
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 12.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi			Dokumen perencanaan tidak berkualitas		

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 12.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur	
13	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah laporan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional bidang infrastruktur	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 13.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
		Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 13.02	jadwal dari instansi pusat tidak sesuai yang direncanakan		Program/kegiatan yang direncanakan tidak dapat terakomodir				
		Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 13.03	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan		Pelaporan tidak tepat waktu				
		Pemantauan dan Evaluasi	hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti	RO - 13.04	pagu anggaran tidak tersedia		Keberhasilan kegiatan sulit diukur				
14	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen perencanaan OPD bidang kewilayahan yang sesuai dengan dokumen perencanaan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 14.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan rencana anggaran kas	Internal	C	Kegiatan tidak terlaksana sesuai jadwal	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda/OPD
		Perencanaan	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 14.02	OPD terlambat menyerahkan dokumen perencanaan		Eksternal			Dokumen perencanaan tidak tersedia sesuai jadwal	

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
					Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
		daerah	Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 14.03		OPD tidak menindaklanjuti hasil asistensi			Kualitas dokumen perencanaan OPD rendah		
			Pemantauan dan Evaluasi	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 14.04		Kemampuan SDM bidang program OPD tidak memadai			Keberhasilan kegiatan sulit diukur		
15	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Penelitian Sosial	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 15.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP PP Sumber Daya Manusia dan Keistimewaan	Tidak tersedianya anggaran	Internal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda	
			Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 15.02		Data tidak tersedia	Eksternal		Waktu pengumpulan data menjadi lebih lama		
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 15.03		Data tidak tersedia			Kualitas laporan tidak akurat		
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 15.04		Data tidak tersedia			Kualitas laporan tidak akurat		
16	Penelitian dan pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Jumlah laporan survey pengembangan Koperasi, usaha kecil dan menengah	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 16.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tidak tersedianya anggaran	Internal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda	
			Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 16.02		Data tidak tersedia	Eksternal		Waktu pengumpulan data menjadi lebih lama		
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 16.03		Data tidak tersedia			Kualitas laporan tidak akurat		
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 16.04		Data tidak tersedia			Kualitas laporan tidak akurat		

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)			C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
					Risiko							
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	
17	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah laporan penelitian bidang lingkungan hidup	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 17.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tidak tersedianya anggaran	Internal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda	
			Perencanaan	Data pendukung tidak lengkap	RO - 17.02		Data tidak tersedia	Eksternal		Waktu pengumpulan data menjadi lebih lama		
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 17.03		Data tidak tersedia	Kualitas laporan tidak akurat				
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 17.04		Data tidak tersedia	Kualitas laporan tidak akurat				
18	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah laporan hasil survey Indeks Kota Layak Huni	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 18.01	Kepala Bappeda/ Kabid PP Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Tidak tersedianya anggaran	Internal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda	
			Perencanaan	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 18.02		Tim survey terlambat memberikan jadwal	Eksternal		Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu		
			Pelaporan	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 18.03		Data tidak tersedia	Kualitas laporan tidak akurat				
			Pemantauan dan Evaluasi	Data tidak lengkap	RO - 18.04		Data tidak tersedia	Kualitas laporan tidak akurat				
19	Penelitian dan pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah laporan penelitian bidang penataan ruang dan pertanahan	Pertanggungjawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 19.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian	Tidak tersedianya anggaran	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda	
			Perencanaan	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 19.02		Tidak sesuai Arus Kas			Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu		

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
			Pelaporan	Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu	RO - 19.03	Program dan Evaluasi	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			Laporan tentang Pelaksanaan kegiatan penataan ruang tidak tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal	RO - 19.04		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			laporan terlambat disampaikan	
20	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah laporan penelitian dibidang teknologi dan informasi	Pertanggungjaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 20.01	Kepala Bappeda/ Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Tidak tersedianya anggaran	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda Aceh/ Bappeda
			Perencanaan	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 20.02		Tidak sesuai Arus Kas			Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	
			Pelaporan	Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu	RO - 20.03		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			Laporan tentang Pelaksanaan kegiatan penataan ruang tidak tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal	RO - 20.04		Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan			laporan terlambat disampaikan	
21	Sosialisasi dan Diseminasi	Jumlah laporan Informasi Hasil-	Pertanggungjaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 21.01	Kepala Bappeda/ Kabid	Tidak tersedianya laporan penelitian	Internal/ Eksternal	C	Kegiatan ditunda	Pemerintah Kota Banda

No	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)		C/ UC	Dampak**)	
			Tahap	Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
					Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
	Hasil-Hasil Kelitbangan	hasil Penelitian dan Pengembangan	Perencanaan	Jadwal tertunda	RO - 21.02	Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Hasil penelitian terlambat disampaikan			Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Aceh/ Bappeda
			Pelaporan	Laporan terlambat disampaikan	RO - 21.03		Hasil penelitian terlambat disampaikan			Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	
			Pemantauan dan Evaluasi	Publikasi hasil diseminasi penelitian terlambat disampaikan	RO - 21.04		Pelaksanaan kegiatan diseminasi terlambat			Hasil penelitian dan pengembangan tidak dapat dimanfaatkan	

Banda Aceh, Januari 2022

η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 4
KERTAS KERJA
HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2022
Tujuan Strategis : Meningkatkan Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh				
1	Rendahnya kepuasan masyarakat terhadap kualitas perencanaan pembangunan Kota	RSP - 01	2	1	2
II	Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	3	2	6
2	Tidak selarasnya Renja OPD terhadap RKPD	RSO-2	3	1	3
3	Indikator kinerja dalam RPJMD tidak mencapai target	RSO-3	3	1	3
III	Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah				
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 01.01	3	1	3
2	Data pendukung usulan tidak lengkap	RO - 01.02	3	1	3
3	Laporan terlambat disampaikan	RO - 01.03	3	1	3
4	Data tidak lengkap	RO - 01.04	3	1	3

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
5	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 02.01	2	1	2
6	Kurangnya data dukung usulan	RO - 02.02	3	1	3
7	Laporan terlambat disampaikan	RO - 02.03	2	2	4
8	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 02.04	2	1	2
9	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 03.01	2	1	2
10	Data evaluasi dan rencana program terlambat disampaikan	RO - 03.02	3	1	3
11	Dokumen RKPD terlambat ditetapkan	RO - 03.03	2	3	6
12	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 03.04	2	1	2
13	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 04.01	3	1	3
14	Data pendukung tidak lengkap	RO - 04.02	3	1	3
15	data tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 04.03	3	1	3
16	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 04.04	2	1	2
17	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 05.01	2	1	2
18	Data pendukung tidak lengkap	RO - 05.02	2	1	2
19	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 05.03	2	1	2
20	Data tidak lengkap	RO - 05.04	2	1	2
21	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 06.01	2	2	4
22	Kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kota tidak sesuai jadwal	RO - 06.02	2	2	4
23	Laporan terlambat disampaikan	RO - 06.03	2	2	4
24	Kurang terpantaunya kegiatan secara optimal	RO - 06.04	2	2	4
25	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 07.01	3	1	3
26	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 07.02	3	1	3

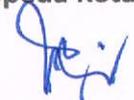
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
27	Laporan terlambat disampaikan	RO - 07.03	3	1	3
28	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 07.04	3	1	3
29	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 08.01	3	1	3
30	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 08.02	3	1	3
31	Laporan terlambat disampaikan	RO - 08.03	3	1	3
32	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 08.04	3	1	3
33	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 09.01	3	1	3
34	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 09.02	3	1	3
35	Laporan terlambat disampaikan	RO - 09.03	3	1	3
36	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 09.04	3	1	3
37	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 10.01	2	1	2
38	Data kemiskinan tidak update	RO - 10.02	3	1	3
39	Laporan terlambat disampaikan	RO - 10.03	3	1	3
40	Kegiatan tidak terpantau secara optimal	RO - 10.04	3	1	3
41	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 11.01	3	1	3
42	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 11.02	3	1	3
43	Laporan terlambat disampaikan	RO - 11.03	3	1	3
44	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 11.04	3	1	3
45	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 12.01	3	1	3
46	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 12.02	3	1	3
47	Laporan terlambat disampaikan	RO - 12.03	3	1	3
48	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 12.04	3	1	3
49	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 13.01	2	1	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
50	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 13.02	2	1	2
51	Laporan terlambat disampaikan	RO - 13.03	2	1	2
52	hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti	RO - 13.04	2	1	2
53	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 14.01	3	1	3
54	Pelaksanaan tidak sesuai jadwal	RO - 14.02	3	1	3
55	Laporan terlambat disampaikan	RO - 14.03	3	1	3
56	Kualitas dokumen perencanaan tidak sesuai dengan standar	RO - 14.04	3	1	3
57	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 15.01	2	1	2
58	Data pendukung tidak lengkap	RO - 15.02	2	1	2
59	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 15.03	2	1	2
60	Data tidak lengkap	RO - 15.04	2	1	2
61	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 16.01	2	1	2
62	Data pendukung tidak lengkap	RO - 16.02	2	1	2
63	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 16.03	2	1	2
64	Data tidak lengkap	RO - 16.04	2	1	2
65	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 17.01	2	1	2
66	Data pendukung tidak lengkap	RO - 17.02	2	1	2
67	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 17.03	2	1	2
68	Data tidak lengkap	RO - 17.04	2	1	2
69	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 18.01	2	1	2
70	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 18.02	2	1	2
71	Laporan tidak lengkap/terlambat disampaikan	RO - 18.03	2	1	2
72	Data tidak lengkap	RO - 18.04	2	1	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
73	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 19.01	2	1	2
74	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 19.02	2	1	2
75	Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu	RO - 19.03	2	1	2
76	pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal	RO - 19.04	2	1	2
77	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 20.01	2	1	2
78	jadwal pelaksanaan tertunda	RO - 20.02	2	1	2
79	Laporan hasil penelitian tidak tepat waktu	RO - 20.03	2	1	2
80	pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai jadwal	RO - 20.04	2	1	2
81	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	RO - 21.01	2	1	2
82	Jadwal tertunda	RO - 21.02	2	1	2
83	Laporan terlambat disampaikan	RO - 21.03	2	1	2
84	Publikasi hasil diseminasi penelitian terlambat disampaikan	RO - 21.04	2	1	2

Banda Aceh, Januari 2022

η Kepala Bappeda Kota Banda Aceh η


WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 5
KERTAS KERJA
DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2022
Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
II	Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	6	Kepala BAPPEDA	Kebijakan lainnya dari Pemerintah provinsi dan pusat	Target pembangunan tahunan Kota tidak tercapai secara optimal
III	Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah					

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
1	Dokumen RKPD terlambat ditetapkan	RO - 03.03	6	Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Data terlambat disampaikan	APBK tidak tepat waktu

Banda Aceh, Januari 2022
 7 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh 8


WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 7
PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN
(RTP ATAS HASIL IDENTIFIKASI RISIKO)

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
Tahun Penilaian : 2022
Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
I	Risiko Strategis Pemerintah Kota Banda Aceh						
	-	-	-	-	-	-	-
II	Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	Melaksanakan asistensi dan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan OPD	Adanya proses penyalarsan program kegiatan dokumen perencanaan OPD dengan dokumen perencanaan kota	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Kepala Bappeda	Triwulan II

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
III	Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						
	Dokumen RKPD terlambat ditetapkan	RO - 03.03	Menyusun kalender perencanaan penyusunan Dokumen RKPD sesuai peraturan yang berlaku	Adanya kontrol/reviu dari pemerintah Provinsi dan APIP Kota terhadap jadwal penyampaian dokumen RKPD	1. Melakukan koordinasi intensif dengan OPD penyedia data 2. Mempersiapkan surat pemberitahuan lebih awal dari jadwal yang seharusnya	Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan II

Banda Aceh, Januari 2022

7 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 8

RENCANA DAN REALISASI ATAS PENGKOMUNIKASIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
 Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Asistensi, Rapat, <i>Online meeting</i> , Surat, Surat Edaran	Bappeda	OPD	Triwulan 1 s.d 2	November 2021 - Februari 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
2	1. Melakukan koordinasi intensif dengan OPD penyedia data 2. Mempersiapkan surat pemberitahuan lebih awal dari jadwal yang seharusnya	Rapat, Surat Pemberitahuan, Surat Edaran	Bappeda dan BPKK	OPD	Triwulan 1 s.d 2	November 2021 - Juni 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

Banda Aceh, Januari 2022

7 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 9

RENCANA DAN REALISASI PEMANTAUAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN INTERN YANG DIBUTUHKAN

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
 Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Verifikasi dokumen, Rapat pertemuan, dan aplikasi	Kepala Bappeda	Triwulan 1 dan 2	November 2021 - Februari 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal
2	1. Melakukan koordinasi intensif dengan OPD penyedia data 2. Mempersiapkan surat pemberitahuan lebih awal dari jadwal yang seharusnya	Dokumentasi, Data Program SIPD dan Notulensi Rapat	Kabid Penelitian, Pengembangan, Pengendalian Program dan Evaluasi	Triwulan 1 dan 2	November 2021 - Juni 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

Banda Aceh, Januari 2022
 11 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh


WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026

Form 10
PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (*RISK EVENT*) DAN PELAKSANAAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kota Banda Aceh
 Tahun Penilaian : 2022
 Tujuan Strategis : Meningkatnya Perencanaan Pembangunan Yang Berkualitas, Aspiratif dan Aplikatif
 Urusan Pemerintahan : Urusan Perencanaan; Urusan Penelitian dan Pengembangan

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
II	Risiko Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	Tidak selarasnya Program RKPD terhadap RPJMD	RSO-1	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Asistensi dan koordinasi dengan OPD	Triwulan 1 dan 2	November 2021 - Februari 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
III	Risiko Operasional Badan Perencanaan Pembangunan Daerah									
1	Dokumen RKPD terlambat ditetapkan	RO - 03.03	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	Tidak terjadi	1. Melakukan koordinasi intensif dengan OPD penyedia data 2. Mempersiapkan surat pemberitahuan lebih awal dari jadwal yang seharusnya	Triwulan 1 dan 2	November 2021 - Juni 2022	Dilaksanakan sesuai prosedur dan jadwal

Banda Aceh, Januari 2022
 Kepala Bappeda Kota Banda Aceh

WERI, SE, MA

Pembina Tk. I

Nip. 19640525 198903 1 026



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDA ACEH
JL. NYAK ADAM KAMIL NO. 19A BANDA ACEH TELP (0651) 32398 FAX (0651) 32397
WEBSITE [HTTPS://BAPPEDA.BANDAACEHKOTA.GO.ID](https://bappeda.bandaacehkota.go.id)